Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PERAN PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT GUNA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI DESA MUSI KECAMATAN LIRUNG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Debora Eva Entaren[1], Fitri Andriyah[2]
[12]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

ARTICLE INFO

Article history:
Received November, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

044172235@ecampus.ut.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Desa Musi, Kecamatan Lirung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan penelitian mencakup perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam proses pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak dalam mendorong partisipasi masyarakat pada berbagai program pembangunan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum merata. Pemerintah desa berupaya meningkatkan keterlibatan warga melalui sosialisasi intensif, transparansi perencanaan, dan penguatan kelembagaan desa. Upaya ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan dan peran aktif warga dalam menentukan arah pembangunan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam kajian pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa literasi pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan elemen penting yang harus diperkuat secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif serta adaptif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat demi tercapainya pembangunan desa yang inklusif yang berkelanjutan ke depan.

Kata kunci: Masyarakat, Partisipasi, Pembangunan berkelanjutan, Pemberdayaan, Peran

A B S T R A C T

This study aims to analyze the role of village government in increasing community participation to achieve sustainable development in Musi Village, Lirung District. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. The research informants included village officials, community leaders, and residents involved in the development process. The results indicate that the village government plays a role as a facilitator, motivator, and motivator in encouraging community participation in various development programs. However, the level of community participation is still influenced by social and economic factors, as well as unequal human resource capacity. The village government is striving to increase community involvement through

*Corresponding author
E-mail addresses: 044172235@ecampus.ut.ac.id

intensive outreach, transparent planning, and strengthening village institutions. These efforts aim to strengthen community understanding of the importance of sustainable development and the active role of residents in determining the direction of development. This research contributes to the development of educational science, particularly in the study of community empowerment. The findings confirm that development literacy and community capacity building are crucial elements that must be continuously strengthened. The results of this study can also serve as a reference for local governments and stakeholders in designing empowerment strategies that are more effective and adaptive to local needs. Therefore, this research is expected to strengthen collaboration between the village government and the community to achieve inclusive and sustainable village development in the future.

Keywords: Community, Participation, Sustainable Development, Empowerment, Role

1. PENDAHULUAN

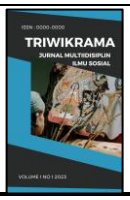
Menurut Mustanir (2022) peningkatan kapasitas sosial masyarakat dan pemerintah desa dengan mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan desa yang berkelanjutan idealnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat. Di Desa Musi, kondisi ideal tercermin ketika pemerintah desa mampu menjalankan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan inklusif, sehingga warga terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pembangunan yang demikian tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkesinambungan.

Namun, realitas di Desa Musi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas. Banyak program pembangunan bersifat top-down, dengan keputusan yang didominasi pemerintah desa tanpa melibatkan warga secara maksimal. Akibatnya, beberapa proyek pembangunan tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat dan cenderung kurang berkelanjutan karena minimnya rasa memiliki dari warga. Fakta lapangan juga mengungkap keterbatasan akses informasi dan sosialisasi program pembangunan, terutama bagi warga di wilayah terpencil. Minimnya pemahaman tentang mekanisme partisipasi dan terbatasnya ruang aspirasi menyebabkan keterlibatan masyarakat rendah. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan di Desa Musi.

Menurut Aminah & Rudianto (2020) bahwa keterlibatan warga sangat menentukan keberhasilan program pembangunan karena partisipasi memberi legitimasi dan akuntabilitas pada kebijakan desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah desa perlu memperkuat peranannya sebagai fasilitator partisipasi masyarakat. Langkah-langkah strategis seperti forum musyawarah rutin, penyuluhan, serta pemanfaatan media informasi yang mudah diakses dapat mendorong warga untuk berkontribusi aktif (Dewi & Yudana, 2021). Dengan pendekatan ini, program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat secara luas. Menurut Kodrianingsih (2023) bahwa pendataan, sosialisasi, dan rapat-rapat koordinasi adalah strategi yang meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan· selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, penguatan organisasi kemasyarakatan, dan pembentukan kelompok kerja partisipatif dapat meningkatkan kapasitas warga dalam berperan aktif. Pemerintah desa juga dapat membangun sistem monitoring dan evaluasi partisipatif untuk menjamin keberlanjutan program serta memastikan kebijakan sesuai aspirasi masyarakat (Sari & Mahfud, 2020).

Dengan kondisi ideal yang menekankan kolaborasi aktif antara pemerintah dan warga, permasalahan utama yang masih dihadapi Desa Musi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat akibat keterbatasan informasi, mekanisme partisipasi yang kurang efektif, dan minimnya pemberdayaan. Oleh karena itu, memperkuat peran pemerintahan desa dalam mendorong partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Musi, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Rumusan masalah dalam artikel ini mencakup pertanyaan, Bagaimana peran Pemerintah Desa Musi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa berkelanjutan?

Tujuan penulisan artikel ini adalah :Menganalisis peran Pemerintah Desa Musi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat partisipasi; dan Merumuskan strategi penguatan peran pemerintah desa dalam pembangunan berkelanjutan.

Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan partisipatif. Secara praktis, artikel ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa, pendamping desa, maupun stakeholder lokal untuk merancang kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fokus tulisan terbatas pada aspek peran pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Keterbatasan tulisan ini terletak pada cakupan analisis yang tidak membahas secara teknis aspek anggaran maupun dinamika politik lokal secara mendalam, serta hanya menggunakan porsi kutipan maksimal 10% dari total referensi agar orisinalitas argumentasi tetap terjaga.

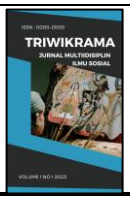
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam peran Pemerintah Desa Musi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara apa adanya berdasarkan kondisi lapangan. Sejalan dengan pandangan Moleong (2019), "penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata". Jenis penelitian ini sesuai pula dengan karakteristik penelitian kualitatif menurut Creswell (2016) yang menyatakan bahwa *"qualitative inquiry explores a problem by developing a detailed understanding of a central phenomenon"*. Dengan demikian, metode ini relevan untuk mengkaji proses partisipasi masyarakat yang bersifat sosial dan dinamis.

Teknik Pengumpulan Data Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama: Wawancara Digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Bungin (2018) menegaskan bahwa "wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya, mendalam, dan penuh makna dari informan". Observasi Observasi dilakukan untuk melihat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Menurut Sugiyono (2017), observasi digunakan ketika penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, atau gejala alam yang dapat diamati. Dokumentasi Dokumentasi seperti RPJMDes, APBDes, dan laporan musyawarah desa dianalisis untuk melengkapi data lapangan. Nasution (2010) menyebut bahwa dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan berguna sebagai bukti untuk memperkuat temuan penelitian. Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Model ini dipilih karena bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti mengembangkan pola hubungan antar-temuan secara sistematis. Keabsahan Data Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hal ini sesuai dengan pendapat Patton (2015) yang menyatakan bahwa "*triangulation strengthens a study by combining methods and sources*". Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

*Corresponding author
E-mail addresses: 044172235@ecampus.ut.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Musi dalam Meningkatkan Partisipasi MasyarakatKajian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Musi memiliki tiga peran utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu peran sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator pembangunan. Pemerintah desa menyediakan ruang musyawarah, menyebarluaskan informasi pembangunan, dan memfasilitasi warga dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program desa. Selain itu, pemerintah desa berupaya membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi pengelolaan anggaran serta kemudahan akses terhadap dokumen perencanaan desa.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Analisis literatur menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama: kualitas komunikasi antara pemerintah desa dan warga, gaya kepemimpinan kepala desa, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta kapasitas literasi masyarakat dalam memahami proses pembangunan. Faktor struktural seperti akses informasi dan edukasi tentang program pembangunan juga menjadi penentu tingkat partisipasi.

Strategi Pemerintah Desa untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Hasil kajian mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat diterapkan, antara lain: peningkatan literasi partisipatif masyarakat, penguatan transparansi dalam pengelolaan pembangunan, optimalisasi forum musyawarah desa, penyusunan program pembangunan berbasis kebutuhan lokal, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan. Strategi tersebut dirumuskan berdasarkan praktik baik pembangunan partisipatif di desa-desa lain serta teori governance yang mendorong keterbukaan dan kolaborasi.

Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Temuan mengenai peran pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator sejalan dengan teori pembangunan partisipatif yang dikemukakan Chambers (1994) bahwa pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Peran fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Desa Musi menunjukkan adanya upaya untuk menggeser pola pembangunan dari top–down menuju model kolaboratif. Hal ini diperkuat oleh pandangan Cohen dan Uphoff (1980), yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak akan berkembang tanpa adanya aktor penggerak dari pemerintah. Dengan demikian, temuan ini menegaskan pentingnya pemerintah desa sebagai motor penggerak dalam menciptakan proses pembangunan yang inklusif.

Penafsiran Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Pembahasan mengenai faktor komunikasi, kepemimpinan, kepercayaan publik, dan literasi masyarakat menunjukkan kesesuaian dengan teori governance yang menekankan transparansi dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang efektif memperkuat kejelasan informasi, sementara kepemimpinan yang partisipatif meningkatkan rasa memiliki warga terhadap program desa. Teori Putnam (1993) tentang kepercayaan sosial (social trust) juga mendukung temuan bahwa kepercayaan publik merupakan modal sosial penting yang dapat mendorong partisipasi kolektif. Kapasitas literasi masyarakat juga sangat memengaruhi kemampuan mereka memahami rencana pembangunan, sehingga semakin tinggi literasi, semakin besar peluang warga untuk berpartisipasi aktif.

Pembahasan Strategi Penguatan Pembangunan Berkelanjutan Strategi peningkatan literasi partisipatif dan transparansi pemerintah desa sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya penguatan kapasitas aparatur desa juga relevan dengan temuan Sutoro (2015) yang menyatakan bahwa pembangunan desa akan efektif apabila pemerintah desa memiliki kemampuan tata kelola yang memadai. Sinergi antara kapasitas pemerintah desa dan partisipasi masyarakat memperkuat keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan karena menciptakan kolaborasi jangka panjang. Pembahasan

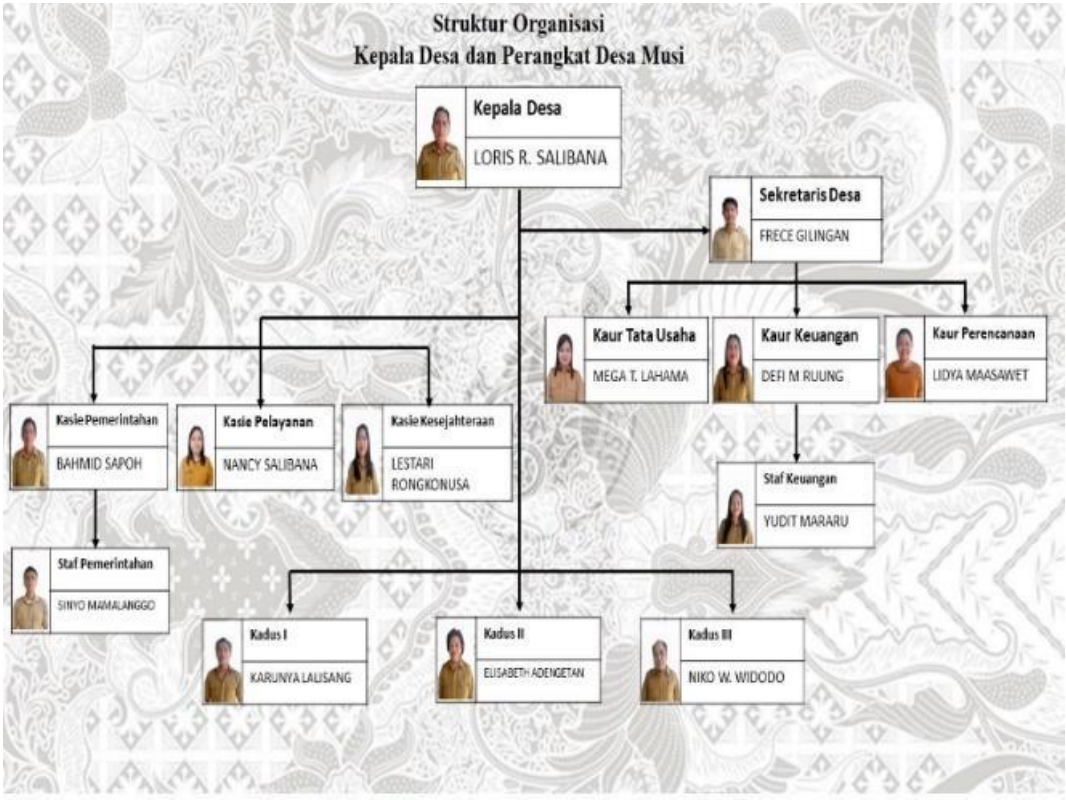
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan di Desa Musi dapat tercapai bila strategi tersebut dijalankan secara konsisten dan terstruktur.

Implikasi Temuan Hasil dan pembahasan artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan masyarakat dan pendidikan kewargaan (civic education), dengan menekankan pentingnya literasi partisipatif sebagai penentu keberhasilan pembangunan desa. Implikasi lainnya adalah kebutuhan pelatihan aparatur desa dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan memahami informasi pembangunan. Kajian ini juga membuka peluang penelitian lanjutan yang dapat menguji efektivitas program partisipatif secara langsung di lapangan.

Gambaran Umum Pemerintah Desa Musi

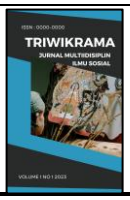
Desa Musi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris Desa, 3 Kepala urusan, 3 kepala seksi, 3 kepala dusun serta 2 orang staf kantor. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Musi

Struktur organisasi Desa Musi dipimpin oleh Kepala Desa Loris R. Salibana dan dibantu oleh perangkat desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kaur (Tata Usaha, Keuangan, Perencanaan), Kasi (Pemerintahan, Pelayanan, Kesejahteraan), Staf Keuangan dan Staf Pemerintahan, Tiga Kepala Dusun (Kadus I, II, III). Struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang jelas dan terarah. Setiap posisi memiliki fungsi yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan desa. Kepala Desa menjadi aktor utama dalam mengarahkan kebijakan, memimpin musyawarah, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekretaris Desa memastikan administrasi dan koordinasi antar perangkat desa berjalan lancar. Kaur Perencanaan memegang

*Corresponding author
E-mail addresses: 044172235@ecampus.ut.ac.id



peran penting dalam menyusun rencana pembangunan partisipatif melalui Musrenbangdes. Kaur Keuangan dan Staf Keuangan menjaga transparansi pengelolaan dana desa, yang merupakan faktor penting untuk mendorong partisipasi masyarakat. Kasi Pemerintahan, Pelayanan, dan Kesejahteraan menangani pelayanan publik, data kependudukan, dan program kesejahteraan masyarakat yang menjadi fondasi partisipasi sosial. Para Kepala Dusun menjadi ujung tombak pemerintah desa dalam menjangkau masyarakat secara langsung, menyampaikan informasi, serta mengorganisasi kegiatan seperti gotong royong dan pembangunan fisik.

Kepala Desa berperan menggerakkan masyarakat melalui musyawarah, sosialisasi, dan arahan kebijakan. Kepemimpinan yang komunikatif mendorong masyarakat berani terlibat dalam program desa. Kaur Perencanaan dan Sekretaris Desa mengoordinasikan Musrenbangdes dan diskusi dusun. Semakin terbuka proses perencanaan, semakin besar keikutsertaan warga.Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan berperan menyediakan layanan administrasi, sosial, dan kesehatan. Pelayanan yang baik meningkatkan kepercayaan warga. Kaur Keuangan dan Staf Keuangan memastikan dana desa dikelola dengan akuntabel. Transparansi adalah kunci meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Para Kepala Dusun selalu berhubungan langsung dengan warga sehingga mampu memobilisasi tenaga masyarakat untuk gotong royong, pembangunan lingkungan, dan program sosial lainnya.

Peran pemerintah desa tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan pemberdaya masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam jangka Panjang.

Pemerintah Desa Musi dapat menerapkan strategi Mempublikasikan APBDes, progres pembangunan, dan laporan pertanggungjawaban secara rutin dan Meningkatkan intensitas Musrenbangdes dan pertemuan dusun agar warga merasa memiliki ruang bicara. Kadus perlu diberi kewenangan lebih dalam pengorganisasian masyarakat untuk bekerja bersama. Pelatihan mengenai tata kelola keuangan, perencanaan partisipatif, dan komunikasi publik harus dilakukan secara berkala. Kerjasama dengan tokoh adat, pemuda, gereja, organisasi perempuan, dan lembaga pendidikan. Mengadakan program kerja bakti lingkungan, revitalisasi kegiatan sosial, dan pembangunan berbasis komunitas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, serta penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

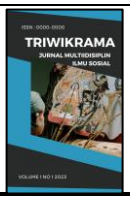
Pemerintah Desa Musi memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, transparansi keuangan, serta perencanaan pembangunan yang partisipatif. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, kepercayaan, komunikasi, dan budaya lokal. Dengan menerapkan strategi seperti transparansi, penguatan kapasitas perangkat desa, dan revitalisasi gotong royong, Desa Musi dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Musi memainkan peran yang sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pengarah utama dalam membangun pola hubungan yang kolaboratif dengan masyarakat. Melalui upaya sosialisasi yang berkesinambungan, mekanisme musyawarah yang lebih terbuka, serta penyediaan ruang partisipasi yang inklusif, pemerintah desa berhasil menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, terutama terkait transparansi informasi, komunikasi dua arah, dan kemampuan aparat desa dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terbukti menjadi faktor penentu utama dalam mendorong kesediaan warga untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan, serta pemahaman masyarakat tentang konsep pembangunan berkelanjutan turut menentukan sejauh mana mereka dapat berpartisipasi secara bermakna.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat masih menghadapi kendala, antara lain ketimpangan tingkat literasi pembangunan, faktor ekonomi yang membatasi waktu dan energi masyarakat untuk terlibat, serta lemahnya peran beberapa lembaga kemasyarakatan yang seharusnya menjadi mitra pemerintah desa. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan desa tidak dapat tercapai hanya melalui kebijakan pemerintah desa, tetapi membutuhkan kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan lokal.

Secara keseluruhan, simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di Desa Musi sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah desa mampu membangun partisipasi masyarakat secara sadar, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya sebuah proses teknis, tetapi merupakan bagian dari proses pemberdayaan yang memerlukan strategi komprehensif, pembinaan yang konsisten, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang.

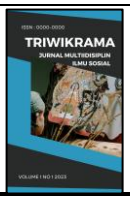
Saran

Pemerintah Desa Musi perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kompetensi perangkat desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan mekanisme musyawarah berbasis partisipasi inklusif. Pemerintah desa disarankan membangun sistem transparansi informasi yang mudah diakses masyarakat meliputi informasi APBDes, rencana kegiatan, serta progres pembangunan agar warga memiliki dasar yang jelas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelaksanaan forum warga seperti *Musrenbang Desa*, diskusi kelompok terarah, dan dialog terbuka perlu dimodifikasi agar lebih ramah terhadap kelompok marginal, perempuan, dan pemuda. Upaya ini juga harus didukung pembentukan unit layanan partisipasi masyarakat di tingkat desa yang berfungsi sebagai kanal pengaduan, aspirasi, dan konsultasi kebijakan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten serta pendamping desa disarankan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan bahwa program pembangunan yang masuk ke Desa Musi selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah perlu menyediakan program pelatihan teknis dan manajerial bagi perangkat desa serta kelompok masyarakat, termasuk pelatihan pengelolaan BUMDes berbasis ekologi, mitigasi risiko lingkungan, dan pemantauan pembangunan partisipatif. Dukungan supervisi dan pendampingan tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus berlanjut hingga pemantauan dan evaluasi agar potensi penyimpangan serta dominasi elit dapat diminimalkan. Selain itu, pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM lingkungan, dan lembaga riset untuk memastikan bahwa keputusan pembangunan di Desa Musi berbasis bukti (*evidence-based*) dan sesuai dengan standar pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat Desa Musi disarankan meningkatkan keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan pembangunan desa mulai dari identifikasi masalah, penyusunan prioritas, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. Kelompok masyarakat seperti karang taruna, PKK, kelompok tani, komunitas

*Corresponding author
E-mail addresses: 044172235@ecampus.ut.ac.id



adat, dan tokoh agama perlu mengambil peran strategis sebagai penggerak perubahan melalui penyampaian aspirasi, pengawasan sosial, serta pengembangan inisiatif lokal yang ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat hendaknya mengembangkan budaya dialog dan kolaborasi sehingga kepentingan berbagai kelompok dapat diakomodasi tanpa konflik sosial. Kolaborasi masyarakat dengan BUMDes, pemerintah desa, dan mitra eksternal juga perlu ditingkatkan, terutama dalam pengembangan kegiatan ekonomi berkelanjutan seperti ekowisata, pertanian organik, pengelolaan sampah terpadu, dan perlindungan sumber daya alam lokal. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan warga, tujuan pembangunan Desa Musi menuju desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan akan semakin mudah dicapai.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S., & Rudianto, H. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 112–123.

Bungin, B. (2018). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.

Chambers, R. (1994). *Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm*. World Development, 22(10), 1437–1454.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. World Development, 8(3), 213–235.

Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dewi, N. P., & Yudana, I. K. (2021). Community empowerment through participatory development planning. International Journal of Social Science and Development, 10(2), 120–130.

Kodrianingsih. (2023). *Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat*. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, 5(1), 45–57.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mustanir, A. (2022). *Peningkatan kapasitas sosial masyarakat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan*. Jurnal Sosial dan Pemerintahan, 9(1), 55–66.

Nasution, S. (2010). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Tarsito.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

Sari, D. K., & Mahfud, T. (2020). Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap efektivitas pembangunan berbasis partisipasi. Jurnal Sosial dan Pemerintahan, 2(4), 77–88.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutoro, E. (2015). *Desa membangun Indonesia*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.